

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
BAB 1 OTONOMI KHUSUS PAPUA	1
BAB 2 OTONOMI KHUSUS SEBAGAI SEBUAH KEBIJAKAN PUBLIK	23
A. <i>Deliberative Public Policy</i> dalam Studi Kebijakan Publik	26
B. Implementasi Kebijakan	29
C. Otonomi Khusus (<i>Asymmetrical Decentralization</i>)	41
BAB 3 GAMBARAN PROVINSI PAPUA, PROVINSI PAPUA BARAT, DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA	55
A. Gambaran Umum Provinsi Papua	55
B. Gambaran Umum Provinsi Papua Barat	65
C. Gambaran Umum Otonomi Khusus Papua	68
BAB 4 CAPAIAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS PAPUA	79
A. Lambang-lambang	79

B. Pembagian Daerah	80
C. Kewenangan Daerah	84
D. Pemerintahan	85
1. DPRP	85
2. Gubernur/Wakil Gubernur	93
3. MRP	101
4. DPRD Kabupaten/Kota; Bupati/Walikota; Beserta Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota; Badan Musyawarah Kampung dan Pemerintah Kampung	104
E. Kepegawaian	105
F. Partai Politik	109
G. Komisi Hukum <i>Ad Hoc</i>	109
H. Keuangan	110
I. Perekonomian	117
J. Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat	123
K. Hak Asasi Manusia	125
L. Kepolisian Daerah Provinsi Papua	129
M. Kekuasaan Peradilan	130
N. Keagamaan	130
O. Pendidikan dan Kebudayaan	131
P. Kesehatan	136
Q. Kependudukan dan Ketenagakerjaan	138
R. Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup	139
S. Sosial	140
T. Pengawasan	140
U. Kerja sama dan Penyelesaian Perselisihan	141
V. Penyusunan Peraturan Pelaksana Undang-Undang	142
W. Pemekaran Provinsi Papua	143
X. Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001	144

Y. Evaluasi UU Nomor 21 Tahun 2001	145
------------------------------------	-----

BAB 5 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTSUS PAPUA

A. Aktor	146
1. Presiden Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001- 20 Oktober 2004)	147
2. Presiden SBY (20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2014)	149
3. Presiden Joko Widodo (20 Oktober 2014- sekarang)	161
4. DPR RI	167
5. DPD RI	171
6. Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat	174
7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan DPR Papua Barat	175
8. Majelis Rakyat Papua (MRP)	176
9. Penghubung: Bupati dan Walikota	176
10. Individu Berpengaruh: Tokoh Masyarakat	177
11. Penerima Manfaat	179
12. Media Massa	183
13. Kelompok Kepentingan: Evaluator dan Pro- Merdeka	184
B. Struktur Organisasi dan Norma Birokrasi	188
1. Prosedur Internal Organisasi	188
2. Alokasi Sumber Daya	190
3. Motivasi Psikologi dan Norma Birokrasi	193
4. Jaringan Komunikasi dan Mekanisme Kepatuhan	194

BAB 6 OTONOMI KHUSUS PAPUA GAGAL?	206
A. Aktor	212
B. Struktur Organisasi dan Norma Birokrasi	214
C. Jaringan Komunikasi dan Mekanisme Kepatuhan	216
D. Sumbangan dari Konteks dan Konten Kebijakan	217
E. Sumbangan dari Tahap Formulasi Kebijakan	218
BAB 7 PENUTUP	226
DAFTAR PUSTAKA	232
INDEKS	247
TENTANG PENULIS	251